

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya tentu memanfaatkan penggunaan dana pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia. Pemerintah menggunakan anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai instrumen perencanaan dan instrumen pengendalian (Ikhsan dan Sari, 2020). Anggaran sebagai instrumen perencanaan digunakan untuk memantau pencapaian suatu tujuan yang diinginkan pemerintah (Putri, 2014 dalam Ikhsan dan Sari, 2020). Sementara itu, anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk memantau alokasi sumber dana publik (Putri, 2014 dalam Ikhsan dan Sari, 2020). Untuk melihat efektivitas anggaran sebagai instrumen pengendalian yang sudah digunakan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, dapat ditinjau pada penggunaan dana anggaran belanja pemerintah itu sendiri (Elim, 2018 dalam Ikhsan dan Sari, 2020).

Menurut Ikhsan dan Sari, (2020) menyatakan bahwa terdapat akun belanja modal dalam APBD yang memperlihatkan sejauh mana pemerintah merealisasikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengeluaran yang dilaksanakannya, meliputi menciptakan lapangan kerja, pembangunan dan pengembangan infrastruktur, menyediakan fasilitas yang memadai, dan lainnya. Kegagalan dalam penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah akan mengakibatkan hilangnya manfaat belanja. Tingkat serapan

anggaran yang tinggi bergantung pada optimalisasi penggunaan sumber dana terbatas, yang seharusnya pemerintah dapat lebih aktif dalam mendorong perencanaan dan mengalokasikan anggaran dengan tepat (Negara *et al*, 2018 dalam Ikhsan dan Sari, 2020).

Salah satu anggaran yang memiliki peran krusial dalam aktivitas pemerintahan adalah anggaran pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa merupakan aktivitas yang diterapkan untuk pemenuhan kebutuhan pada instansi pemerintah yang bertujuan untuk memperoleh barang dan jasa yang dianggarkan guna menunjang kinerja dari instansi tersebut. Menurut Okniafita dan Handayani (2022), menyatakan bahwa pemerintah daerah diharapkan dapat menyerap dengan baik anggaran pengadaan barang/jasa yang cukup besar, agar keuntungan dari pengeluaran tetap terjaga. Percepatan penyerapan anggaran berdampak pada pengadaan barang/jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kemajuan pembangunan di beberapa sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, pariwisata, pengembangan SDM, dan lain-lain (Okniafita dan Handayani, 2022).

Menurut Ikhsan dan Sari, (2020) menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengadaaan barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan upaya untuk merealisasikan tujuan. Melalui pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan pada tahap awal perencanaan anggaran, maksud dari pencapaian tujuan organisasi pemerintah tersebut agar penyerapan anggaran segera dilakukan (Ikhsan dan Sari, 2020).

Saat ini pemerintah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa sudah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan menggunakan *e-procurement*. *E-procurement* adalah sistem pengadaan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Sistem pengadaan barang/jasa ini telah diterapkan salah satunya di Pemerintah Kabupaten Bantul. Berikut ini contoh pengadaan di Kabupaten Bantul:

**Gambar 1.1 Contoh Pengadaan**

No	Detail Pengadaan	Lokasi	Status	Nilai Kontrak
5339285	Belanja Cetak Kalender Pengadaan Barang - TA 2023 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp. 94.794.000,00	Kab. Bantul	Paket Sudah Selesai	94,8 Jt
5334285	Pengadaan Belanja Cadangan Pangan Beras Medium Pengadaan Barang - TA 2023 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp. 97.597.500,00	Kab. Bantul	Paket Sudah Selesai	99 Jt
5324285	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengadaan Barang - TA 2023 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp. 39.950.010,00	Kab. Bantul	Paket Sudah Selesai	40 Jt
5148285	Paket Penanda Batas Pengadaan Barang - TA 2023 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp. 179.500.000,00	Kab. Bantul	Paket Sudah Selesai	180 Jt
5061285	Bahan praktek pelatihan pengelolaan sampah Pengadaan Barang - TA 2023 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp. 179.420.400,00	Kab. Bantul	Paket Sudah Selesai	180 Jt
5037285	Belanja Pakaihan Olahraga Pengadaan Barang - TA 2023 - Pengadaan Langsung Nilai Kontrak : Rp. 56.804.250,00	Kab. Bantul	Paket Sudah Selesai	56,9 Jt

Sumber: situs web [lpse.bantulkab.go.id](http://lpse.bantulkab.go.id)

Dalam anggaran pemerintah, permasalahan yang sering terjadi dan mengakibatkan tidak meratanya penyerapan anggaran pemerintah yaitu penerapan anggaran yang rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun (Suwarni, 2018 dalam Ramadhani dan Setiawan, 2019). Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, permasalahan anggaran juga sering terjadi karena realisasi anggaran yang tidak sesuai target yang ditetapkan.

Fenomena terkait penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa terjadi di Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa kurang optimalnya penyerapan anggaran karena adanya kendala dalam tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Menurut Perubahan RKPD Kabupaten Bantul 2023, pada realisasi fisik dan keuangan yang terserap antara target yang direncanakan dengan laporan realisasi APBD Triwulan II, dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini bahwa jumlah anggaran belanja barang dan jasa yang direalisasikan sebesar 42,01% dimana masih dibawah target yang dianggarkan yaitu sebesar 55,00%.

**Tabel 1.1 Target Realisasi Keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023**

Bulan	Jenis Belanja	Target (%)	Realisasi (%)
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>64</b>	<b>51,69</b>
	Belanja Pegawai	71	<b>61,28</b>
<b>s.d Juni 2023</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>55</b>	<b>42,01</b>
	Belanja Hibah	66	<b>38,48</b>
	Belanja Bantuan Sosial	65	<b>53,78</b>
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>30</b>	<b>17,64</b>
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>50</b>	<b>1,09</b>
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>82</b>	<b>55,82</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>48,52</b>

Sumber: Rencana Keuangan Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2023

Jika tidak dilakukan penanganan yang baik dengan segera, hal tersebut akan mempengaruhi kurang optimalnya penyusunan anggaran pengadaan barang/jasa yang akan mengakibatkan rendahnya serapan anggaran di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Penyerapan Anggaran terkait pengadaan barang/jasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu komitmen manajemen. Menurut Denika, (2017) dalam Okniafita dan Handayani, (2022) menyatakan bahwa komitmen manajemen adalah suatu sikap dimana manajemen berkeinginan untuk melibatkan diri dengan nyaman pada organisasi tempatnya bekerja dan

berkontribusi dengan memberikan komitmennya dalam bentuk produktivitas dan waktu, untuk mencapai kesejahteraan organisasi. Komitmen terhadap manajemen dapat diterapkan pada organisasi dengan memberikan suatu pembelajaran, penghargaan, dan penekanan (Okniafita dan Handayani, 2022). Pada sektor pemerintah, pencapaian target anggaran dibantu oleh manajemen yang berkomitmen dan berkompentensi (Halim dan Kusufi, (2012) dalam Okniafita dan Handayani, (2022). Dalam mencapai tujuan yang sama, komitmen manajemen menunjukkan korelasi antara pimpinan dengan bawahan, yang berarti bahwa komitmen manajemen berdampak pada penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa (Cooper, 2006 dalam Ikhsan dan Sari, 2020) ,

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa adalah lingkungan birokrasi. Lingkungan birokrasi menunjukkan situasi atau kondisi dalam organisasi pemerintah, dimana diatur dengan serangkaian ketentuan dan petunjuk yang disusun dengan optimal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa (Okniafita dan Handayani, 2022). Baik buruknya keadaan lingkungan birokrasi dapat menjadi penentu keberhasilan suatu kegiatan (Ikhsan dan Sari, 2020). Kejelasan dalam lingkungan birokrasi yang mencakup kondisi kerja, baik internal maupun eksternal diperlukan, agar organisasi memiliki struktur kerja yang tetap dan konsisten (Ikhsan dan Sari, 2020). Suatu organisasi akan sukses, jika dalam kegiatan organisasi terdapat dorongan lingkungan birokrasi secara optimal. Sehingga, efektivitas penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa

dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan birokrasi (Okniafita dan Handayani, 2022).

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi penyerapan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa adalah sumber daya manusia. Menurut Putri, (2014) dalam Sari dan Maria, (2023) menyatakan bahwa penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah dipengaruhi oleh ketersediaan dana, dokumen pengadaan, dan kompetensi sumber daya manusia. Kesuksesan pencapaian tujuan organisasi sebagian besar ditentukan oleh sumber daya manusia (Sari dan Maria, 2023). Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia perlu dilakukan sebaik-baiknya agar mampu berkontribusi dengan optimal pada organisasi (Sutrisno, 2011 dalam Sari dan Maria, 2023).

Faktor lain yang juga bisa mempengaruhi penyerapan anggaran untuk pengadaan barang/jasa adalah penggunaan *e-procurement*. Menurut Salim dkk, (2016) dalam Apriliani *et al.*, (2022) bahwa *e-procurement* bermanfaat untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam mendukung persaingan usaha yang baik. Teknologi ini diciptakan dengan tujuan untuk memfokuskan interaksi organisasi, pelanggan dan mitra lainnya guna meningkatkan efisiensi dan kecepatan praktik pengadaan (Apriliani *et al.*, 2022). Penerapan *e-procurement* dapat menghasilkan dan mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kinerja baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah (Nurlina *et al.*, 2018 dalam Apriliani *et al.*, 2022).

Penelitian ini yaitu pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okniafita dan Handayani, (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dan Sari, (2020). Dalam penelitian terdahulu terdapat variabel independen termasuk komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, dan pengetahuan peraturan. Berbeda dengan penelitian ini terdapat variabel independen termasuk komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, sumber daya manusia, dan penggunaan *e-procurement*. Selain itu, teori yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu teori institusional. Sementara, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori institusional dan teori *stewardship*. Perbedaan selanjutnya bahwa objek penelitian pada penelitian terdahulu di Kota Pariaman, sedangkan objek pada penelitian ini di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bantul. Melihat adanya permasalahan kurang maksimalnya dalam tahap penyerapan anggaran pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga menjadi alasan penting untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komitmen Manajemen, Lingkungan Birokrasi, Sumber Daya Manusia, dan Penggunaan *E-Procurement* Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa?
2. Apakah lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa?
3. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa?
4. Apakah penggunaan *e-procurement* berpengaruh terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis membatasi masalah dalam penelitian agar lebih fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Variabel yang diambil pada penelitian ini adalah komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, sumber daya manusia, penggunaan *e-procurement*, dan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh komitmen manajemen terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
2. Untuk menguji pengaruh lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
3. Untuk menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.
4. Untuk menguji pengaruh penggunaan *e-procurement* terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi dan manajemen publik, khususnya mengenai penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik penelitian serupa mengenai faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa, seperti komitmen manajemen, lingkungan birokrasi, sumber daya manusia, dan penggunaan *e-procurement*.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi OPD dalam mengelola anggaran. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, OPD dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki proses pengadaan dan meningkatkan penyerapan anggaran, sehingga mengurangi risiko penyerapan yang rendah.